

BAB I PENDAHULUAN

Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Berdasarkan konstruksi itu, penyelenggaraan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran UUD 1945 pada Pasal 18, 18A, dan 18B menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah tersebut adalah untuk memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah; meningkatnya prakarsa dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah diharapkan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat yang terlihat dalam partisipasi warga masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, ikut sertanya warga masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, ikut sertanya memelihara hasil-hasil pembangunan; serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berupa kesadaran membantu kesengsaraan atau musibah yang dialami masyarakat di tempat lain di Indonesia, tidak diskrimatif, tidak membedakan asal suku bangsa. Selain hal itu, otonomi daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang ditandai oleh semakin cepat, murah, akurat dan tidak diskriminatifnya dalam pelayanan, dan daya saing daerah yang semakin tinggi dengan adanya perekonomian daerah yang semakin meningkat, sarana dan prasarana yang

semakin banyak dan memadai, semakin banyak investasi yang masuk, pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dan angka ketergantungan yang semakin rendah.

Sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sebagai daerah otonom yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab IV Bagian Ketiga Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut yaitu mengenai hubungan hak dan kewajiban daerah berupa hubungan antara penggunaan sumberdaya-sumberdaya (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Oleh karena itu sebagai daerah otonom (kabupaten/kota) diberi hak, berkewenangan dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepada daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Singkatnya, Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah, sedangkan daerah otonom melaksanakan (*to exercise*) kewenangan yang diberikan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat menggali sumberdaya yang dimiliki daerah yang akan digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan ataupun penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan interaksional antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Pemerintah Daerah lebih aspiratif terhadap aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat menguntungkan rakyat, sebaliknya ada pula yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah otonomi yang baru, maka masyarakat sipil diharapkan akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Terdapat 7 (tujuh) propinsi, 135 kabupaten dan 32 kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh DPD pada September 2007. Aspek yang kental dirasakan adalah justru bermainnya kepentingan pribadi, kelompok, etnis, agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan sosial, rasa iri, ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan sebagainya (DRSP, 2007).

Selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2004 telah terbentuk 148 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 114 (seratus empat belas) kabupaten dan 27 kota. Pada kurun waktu 2007 dan 2009 daerah otonomi baru telah bertambah lagi dengan 57 kabupaten/kota, sehingga saat ini terdapat 205 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Pembentukan ini menambah jumlah daerah otonomi di Indonesia yang totalnya menjadi 524 daerah otonom (33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota) (Sumarsono, 2010).

Kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru sebanyak 114 kabupaten tersebut berdasarkan kajian Yulistiani, dkk (2007) dibandingkan dengan kabupaten induknya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Ada sebanyak 60 kabupaten pemekaran yang pertumbuhannya lebih tinggi dari kabupaten induknya dan sebanyak 54 kabupaten pemekaran yang pertumbuhannya lebih rendah dari kabupaten induknya. Hal ini dapat berarti kabupaten pemekaran yang pertumbuhannya lebih tinggi dari kabupaten induknya, mungkin dulunya merupakan daerah yang telah berkembang sebelum pemekaran atau daerah penyumbang pada APBD terbesar bagi kabupaten sebelum pemekaran. Kabupaten pemekaran yang pertumbuhannya lebih rendah dari kabupaten induknya ada kemungkinan sebelumnya merupakan daerah yang terabaikan dalam pembangunan atau daerah yang potensinya memang kurang memadai (lihat Lampiran 1).

Rendahnya pertimbangan aspek ekonomi dalam pemekaran wilayah adalah suatu kenyataan. Hal ini sesuai dengan Teori Mesin Pertumbuhan (*Growth Machine Theory*) yang dikemukakan Molotch (1976) mengatakan alasan dari pertumbuhan wilayah adalah koalisi antara politik lokal dan elite ekonomi. Dalam teori ini, dorongan untuk mengejar strategi pertumbuhan wilayah datang bukan dari kekuatan struktural ekonomi atau dari tendensi keseimbangan yang dihasilkan oleh ekspor dan perdagangan. Sebagai penggantinya, datang dari koalisi politik dari elite (birokrasi) yang siap mengambil keuntungan dari pembangunan ekonomi lokal [Wolman, 1996 dalam Dawkins (2003)]. Teori ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi daerah di Indonesia untuk memekarkan diri yang didorong oleh organisasi birokrasi di daerah, bukan didasarkan karena alasan ekonomi. Sebagaimana Jeddawi yang mengutip pendapat Syarif Hidayat (2007), sebagian besar daerah pemekaran dibentuk atas usul sekelompok elite politik daerah, bukan atas usul masyarakat (Jeddawi, 2009).

Hasil studi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI (2005) menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah yang selama ini dilakukan ternyata belum secara sungguh-sungguh

memperhitungkan aspek kinerja pembangunan daerah. Data dan informasi yang digunakan cenderung manipulatif dan tidak sesuai dengan realitas sehingga wajar apabila daerah baru hasil pemekaran memiliki kinerja yang kurang baik. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang ada belum optimal atau ideal dalam upaya mendukung pencapaian dan tujuan otonomi daerah. Ukuran optimal pemerintah daerah akan tercapai apabila memenuhi kriteria efisiensi, distribusi, demokrasi dan kinerja pembangunan (Brodjonegoro, 2006). Selanjutnya daerah pemekaran dalam pembangunan ekonomi daerahnya dapat memainkan peran-peran seperti wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989:69 dalam Kuncoro, 2004:113) guna meningkatkan perekonomian daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Ratnawati (2009) mengutip hasil studi dari tim Bank Dunia yang menyimpulkan adanya empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu : 1) motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan; 2) kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dan lain-lain); 3) adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan DAU, bagi hasil dari sumberdaya alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD); 4) motif pemburu rente (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit. Di samping itu masih ada satu motif "tersembunyi" dari pemekaran daerah, yang oleh Ikrar Nusa Bhakti disebut sebagai *gerrymander*, yaitu usaha pembelahan/pemekaran daerah untuk kepentingan parpol tertentu. Contohnya adalah kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan Megawati (PDIP) dengan tujuan untuk memecah suatu partai lawan.

Persoalannya: apakah kabupaten pemekaran tersebut berhasil mewujudkan tujuan dari pemekarannya? Hingga taraf ini, dapat dikatakan bahwa tumbuhnya daerah-daerah otonom baru tersebut cenderung menghadirkan masalah daripada manfaat pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu diteliti, bagaimana kabupaten pemekaran pada saat sekarang, apakah berhasil mewujudkan tujuan awal pembentukan daerah otonom atau tidak.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pemekaran wilayah dalam isu organisasi birokrasi sebagai "lahan" perluasan lapangan kerja, seperti dikemukakan Jeddawi (2009) pemekaran daerah lebih menarik karena dampak dari pemekaran daerah banyak membuka peluang bagi masuknya pejabat-

pejabat baru, ataupun jabatan publik. Jeddawi (2009) memberi kesimpulan bahwa pemekaran daerah memakmurkan pencari jabatan di daerah.

2. Isu pelayanan publik yang meningkat yang menjadi alasan utama dari pemekaran wilayah ternyata tidak dapat dipenuhi. Piliang, dkk (2003) mencatat, pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik sekitar 70% dari tahun 2001 dan 2002, dan yang paling tinggi pengaduan tentang pelayanan PLN, sementara pelayanan air bersih (PDAM) dan mekanisme pembuatan KTP juga mengalami masalah. Di bidang pendidikan, 38% bangunan di Lombok Barat sudah tidak layak pakai tapi dipaksakan dipakai. Di Bandar Lampung (basis industri) 50% bangunan pendidikan juga mengalami kerusakan. Sebelum otonomi daerah, sarana proses belajar mengajar seperti pengadaan buku, kapur tulis dan bangku sekolah, buku panduan dan buku wajib untuk pelajaran setiap tahun rutin datang ke masing-masing sekolah, tetapi setelah otonomi tidak ada satu buku pun datang ke sekolah. Begitu juga Baswan (2009) menyimpulkan bahwa Kabupaten Banggai (basis pertanian) dalam melaksanakan otonomi daerah dari aspek pelayanan dasar belum optimal. Ratnawati (2009) mencatat, peningkatan pengeluaran Negara tersebut terjadi karena setiap pembentukan daerah baru memerlukan kantor polisi baru, kantor agama baru, kantor pengadilan baru, penambahan pegawai baru, dan lain-lain. Ismail (2010) menulis kabupaten di Kalimantan Timur yang kaya akan SDA, yakni Kabupaten Kutai Barat—biasa disebut Kubar, kabupaten ini pernah menjadi penghasil emas terbesar di Kalimantan Timur dengan jumlah produksi mencapai 14 ton emas per-tahunnya. Namun seakan bernasib serupa dengan Kutai Kartanegara, jumlah penduduk miskinnya juga menggelembung, mencapai 51.267 jiwa dari jumlah penduduk Kubar 157.847 jiwa. Lain lagi dengan Kabupaten Kutai Timur—Kutim. Jumlah penduduknya sebanyak 203.156 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 98.025 jiwa atau 48,25%, itu artinya nyaris separuh penduduk Kutim, adalah penduduk miskin, dan masyarakat miskin tersebut justru berada di sekitar tambang yang terkonsentrasi di 3 kecamatan yang selama ini menjadi kantong pertambangan yakni Sengata Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon yang berjumlah 73.981 jiwa (45,69%) dari 203.156 jiwa, total penduduk Kutim.
3. Isu in-efisiensi dalam birokrasi pemerintahan terlihat dari semakin besarnya pengeluaran rutin pemerintah kabupaten/kota untuk belanja pegawai terhadap total pengeluaran. Khusaini (2006) mencatat, proporsi pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata sebesar 75,3% sebelum

desentralisasi fiskal (tahun 1999) dan turun menjadi 68,85% setelah desentralisasi fiskal (2002). Tetapi berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa secara nominal pengeluaran rutin setelah desentralisasi fiskal mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu rata-rata Rp. 2,9 milyar (tahun 1999) menjadi Rp. 7,8 milyar (tahun 2002). Peningkatan pengeluaran rutin yang sangat besar tersebut antara lain disebabkan oleh melimpahnya beberapa pegawai daerah. Dalam banyak kasus, sebagian besar pengeluaran rutin digunakan untuk membayar gaji para guru. Hasil penelitian Ratnawati (2006), menyebutkan Kabupaten Belu yang bersifat agraris dan relatif miskin ini (alamnya panas dan gersang, miskin sumberdaya alam, penduduknya yang mayoritas petani/berkebun umumnya miskin) proporsi PAD pada tahun 2003 hanya sekitar 4% dari total APBD. Sebaliknya jumlah DAU sangat besar. Sistem DAU ini mendorong daerah untuk melakukan proliferasi birokrasi lokal (pembengkakan jumlah unit-unit pemerintahan dan jumlah pegawai daerah) untuk mendapatkan budget yang lebih besar dari Jakarta. Struktur organisasi Pemda Belu, 19 dinas daerah (plus 19 cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas), lima buah kantor, lima buah badan terlalu besar "gemuk", tidak efisien/rasional. Di Kabupaten Bangka dan Padang Pariaman yang lebih 'kaya' jumlah dinas kurang dari 15 buah. Dana dari Negara hampir semuanya terserap untuk membiayai birokrasi pemda. Hal ini berarti otonomi daerah yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi masyarakat di daerah, berhenti di pemda termasuk DPRD yang ikut menikmati anggaran yang cukup besar.

4. Isu lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan Ratnawati (2006) memberi contoh, Pulau Batam sebagai sebuah kawasan industri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif itu antara lain berupa terbukanya lapangan kerja, berkembangnya perdagangan, dan hidupnya transportasi. Negatifnya di antaranya berupa kerusakan lingkungan hidup, pengangguran, kriminalitas, dan pelacuran.
5. Isu tata ruang sebagaimana dikatakan Harmantyo (2007) di samping belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah setempat, di sisi lain pemekaran daerah justru menimbulkan konflik keruangan seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, perebutan Pulau Berhala antara Propinsi Riau Kepulauan dan Propinsi Jambi, perebutan salah satu pulau di Kepulauan Seribu antara Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten. Berbagai persoalan tersebut merupakan sebagian permasalahan yang menyangkut pelaksanaan prinsip desentralisasi/otonomi dan pemekaran daerah.



Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimana pengembangan wilayah di kabupaten hasil pemekaran wilayah yang menjadi daerah otonom baru selama ini? Selanjutnya, latar belakang dan identifikasi masalah tersebut memunculkan rumusan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kajian pemekaran wilayah sebagai daerah otonom baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tipologi kabupaten pemekaran?
- 2) Bagaimana pembangunan ekonomi di kabupaten pemekaran dilaksanakan?
- 3) Bagaimana kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran dalam?
- 4) Bagaimana sosial kemasyarakatan di kabupaten pemekaran?
- 5) Bagaimana keberlanjutan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup di kabupaten pemekaran?
- 6) Bagaimana pemekaran wilayah yang seharusnya?

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengkaji pemekaran wilayah sebagai daerah otonom yang baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia dan secara rinci penelitian bertujuan :

- 1) Menganalisis tipologi kabupaten pemekaran.
- 2) Menguraikan pelaksanaan pembangunan ekonomi di kabupaten pemekaran.
- 3) Menguraikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran.
- 4) Menguraikan sosial kemasyarakatan di kabupaten pemekaran.
- 5) Menguraikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kabupaten hasil pemekaran wilayah.
- 6) Menyusun rekomendasi kebijakan pemekaran wilayah

Mardiasmo (2002) mengemukakan pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan, (3) keberlanjutan ekosistem (Anwar dan Rustiadi, 2000), serta pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau lebih lanjut kinerja kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru yang dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat (penduduk miskin), IPM, pelayanan publik, daya saing daerah dan potensi daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari persentase penduduk miskin yang rendah dan hal ini mengindikasikan kinerja birokrasi yang efisien. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit

tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, (2) berpengetahuan dan berketerampilan, serta (3) akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Rustiadi, *et al.*, 2009). Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. IPM yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan standar pelayanan yang tinggi pula. Daya saing daerah *outputnya* adalah peningkatan perekonomian daerah dan sebagai *outcomes* adalah kesejahteraan masyarakat (Yulistiani, *et al.*, 2007). Apabila kesejahteraan masyarakat dapat dicapai maka pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya kabupaten pemekaran akan diteliti seberapa besar pertumbuhan ekonominyayang meliputi tiga komponen, yaitu :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Pemerataan pendapatan juga dapat mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat, karena pemerataan pendapatan dapat mengurangi kemiskinan. Sosial kemasyarakatan dapat dikatakan merupakan kelompok sosial yang mempunyai struktur, mempunyai norma, yang semuanya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi atas dasar interaksi yang dinamis dan timbal balik antara orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kelompok itu (Gerungan,1988).Sosial kemasyarakatan akan ditinjau dari persepsi masyarakat terhadap masalah kebersamaan dan konflik yang terjadi. Keberlanjutan ekosistem akan dilihat dari persepsi masyarakat akan kehancuran SDA dan lingkungan hidup di kabupaten pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Adisasmita Rahardja. 2008. *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alikodra, Hadi S dan HR Syaukani. 2004. *Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas : Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan*. Bandung : Yayasan Nuansa.
- Albrecht Karl. 1985. *Pengembangan Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Penterjemah Syariful Anwar. Bandung : Percetakan Angkasa.
- [Anonim]. 2006. *Definisi/Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi- Ilmu Ekonomi Manajemen*. Organisasi.Org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia. Tue, 23/05/2006
- [Anonim]. 2008, *Analisis Ahli Keuangan, Ekonomi, Geografi, Kependudukan, Manajemen Pemerintahan, Administrasi Publik, Pertahanan Keamanan serta Politik dan Sosial Budaya terhadap Pemekaran Wilayah*. tidak dipublikasikan.
- Anwar Affendi dan Rustiadi Ernan. 2000. *Perspektif Pembangunan Tata Ruang (Spasial) Wilayah Perdesaan Dalam Rangka Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Anwar Affendi. 1995. *Kebijaksanaan Ekonomi Untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembangunan Wilayah*. makalah, disampaikan pada Seminar Sehari "Peningkatan Kemampuan Industri Berwawasan Lingkungan Hidup, Menuju Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Era Globalisasi", Sekolah Tinggi Management Industri, Departemen Perindustrian, Jakarta 8 Juni 1995.
- Arikunto Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Pertama, edisi ke-4. Yogyakarta : Aditya Media.
- Azra Azyumardi. 2010. Dimensi Politik Pembentukan Daerah Otonom. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Jurnal Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan*. Edisi 33 Tahun 2010. Jakarta : MIPI.
- Basri Faisal dan Munandar Haris. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia – Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Baswan Hasan. 2009. *Evaluasi Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (EKPOD) – Kemungkinan Aplikasi EKPOD Aspek Pelayanan Dasar Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana MAPD IPDN.
- [BI] Bank Indonesia. 2008. *Analisis Ekonomi Makro*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Jakarta : BPS.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007 – 2008*. Jakarta : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009a. *Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2010*. Jakarta : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Provinsi Dalam Angka 2010*. 26 dari 33 provinsi kecuali DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2010*. Jakarta : BPS.
- Budiman Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cheema G. Shabbir and Rondinelli Dennis A. 1983. *Decentralization and Development – Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.
- Daryanto Arief dan Hafizrianda Yundy. 2010. *Model-Model Kuantitatif, untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*. Cetakan pertama. Bogor : PT Penerbit IPB Press
- Dawkins Casey J. 2003. Regional Development Theory : Conceptual Foundations, Classics Works, and Recent Development. *Journal of Planning Literature* Volume 18 Nomor 2 (November 2003): 146.
- Djakapermana Ruchyat Deni. 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*. Kampus IPB Darmaga Bogor : IPB Press.
- Endraprahasta Galuh Syahbana. 2009. *Strategi Pengembangan Wilayah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Bandung Barat)*. Tesis. Bogor : Sekolah Pascasarjana IPB.
- Fauzi Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi Akhmad. 2007. *Economic Of Matures Non-Convexity. Reorientasi Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya Bagi Indonseia*. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 10 November 2007.
- Fauzi Akhmad. tanpa tahun. *Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Sourkraft!!*. Makalah bebas. IPB.
- Farida Aulia. 2010. *Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi*. Tesis. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Firman Tommy. 2008. *Pengembangan Wilayah Untuk Jangka Panjang*. <http://www.geocities.com/nuds2/15.html>
- Furqan. 2002. *Statistika Terapan untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Gerungan WA. 1988. *Psikologi Sosial*. Edisi kedua, cetakan kesebelas. Bandung : PT Eresco

- Hafsah Mohammad Jafar. 2008. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Institute for Religious and Institutional Studies (Iris) Press.
- Hamdi Muchlis. 2007. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pamong Praja Forum Komunikasi Alumni IIP*. Edisi 9-2007.
- Harmantyo Djoko. 2007. *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*. Makara, Sains, Vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22.
- Ismail Johansyah Merah. 2010. *Melimpah SDA, Melimpah Masalah; Potret Singkat Industri Ekstraktif di Kaltim*. Kompasiana. Sharing.connecting : 01 Januari 2010:17.04.
- Jeddawi Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta : Total Media.
- Juanda Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor : IPB Press.
- Kartasasmita Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Kasali Rhenald. 2006. *Change. Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah Yang Anda Jalani, Putar Arah Sekarang Juga (Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [KDN] Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Desain Besar Penataan Daerah Tahun 2010 - 2025*. Edisi Revisi. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
- Khusaini Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFE UNIBRAW.
- Kuncoro Mudradjat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kusumastuti Dyah. 2010. Reformasi Birokrasi Dengan Implementasi Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Program Pascasarjana IIP. Volume I, edisi ke-10 2010.
- Litvack Jennie, Jessica Seddon. 1998. *Decentralization – Briefing Notes*. Wasingthon DC : The World Bank.
- Luqman. 2010. “*Sentralisasi*”. Empowering Society, Idealism. Sunday, 16 May 2010
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mankiw Gregory N.2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi kelima, Alih bahasa Nurmawan Imam. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mawardi Mohammad Ikhwanuddin. 2009. *Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*. Bogor : IPB Press.
- Mirsa RP. 1982. *Regional Development*. Singapore : Maruzen Asia.

- Mohammad Ismail. 2003. Disampaikan dalam acara Seminar “*Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi*” yang diselenggarakan oleh Bappenas, pada tanggal 18 Desember 2003, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat
- Molotch. 1976. Growth Machine Theory. Dalam Dawkins Casey J. 2003. Regional Development Theory : Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Development. *Journal of Planning Literature*. Vol. 18, No. 2 (November 2003). Copuright © 2003 by Sage Publications.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia, Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E.
- Muhadjir Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Cetakan 8. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin.
- Napitupulu Paimin. 2007. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni.
- Nugraha R. Aga. Oktober 2007. *Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah di Provinsi Bali Pasca Tragedi Bom*. Denpasar : Bank Indonesia Denpasar.
- Nugroho I dan Dahuri R. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Nurcholis Hanif. 2007. *Teori dan Praktek : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Partowidagdo Widjajono. 1999. *Memahami Analisis Kebijakan- Kasus Reformasi Indonesia*. Bandung : Program Studi Pembangunan Program Pasca Sarjana – ITB.
- Piliang Indra J, Ramdani Dendi, Pribadi Agung. 2003. *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta : Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*.
- Pramusinto Agus, Purwanto Erwan Agus. Editor. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, JIAN-UGM, MAP-UGM.
- Pribadi Didit O, Panuju Dyah R, Rustiadi Ernan, Emma P Andrea. Tanpa tahun. *Permodelan Perencanaan Pengembangan Wilayah : Konsep, Metode, Aplikasi, dan Teknik Komputasi*. Bogor
- Ratnawati Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Ratnawati Tri. *Potret Pemerintahan Lokal Di Indonesia Di Masa Perubahan – Otonomi Daerah tahun 2000-2005*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Riyadi Dodi Slamet. 2002. Pengembangan Wilayah : Teori dan Kosep. Di dalam : Ambardi Urbanus M dan Prihawantoro Socia. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Pusat Kajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Rondinelli Dennis A, Cheema G Shabbir. 2003. *Reinventing Goverbenebt for the Twenty-Firsr Century. State Capacity in a Globalizing Society*. USA : Kumarian Press, Inc.
- Rosyadi Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Cetakan pertama. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Rudito Bambang. 2007. *Audit Sosial*. Bandung : Rekayasa Sains.

- Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun, Panuju Dyah R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Saefulhakim R. Sunsun. 2004. *Modul Permodelan Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan*. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Saefulhakim R. Sunsun. 2008. *Modul Pemetaan Potensi Ekonomi untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah : Konsep, Metode, Aplikasi dan Teknik Komputasi*. Bogor : Community and Regional Development Institute of Aqwati (CORDIA), Aqwati Center.
- Sanit Arbi. 2010. Perpolitikan Titik Berat dan Pemekaran Daerah Otonom. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Jurnal Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan*. Edisi 33 Tahun 2010. Jakarta : MIPI.
- Santosa Budi. 2007. *Data Mining, Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Santoso F. Harianto, editor. 2004. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 4*. Jakarta : Kompas.
- Santoso F. Harianto, editor. 2005. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 5*. Jakarta : Kompas.
- Saragih Bungaran *et al.* .1994. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- [Sekneg] Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1986. *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Stimson Robert J, Stough Roger R, Roberts Brian H. 2006. *Regional Economic Development – Analysis and Planning Strategy*. Second edition. Verlag BerlinHeidelberg : Springer.
- Stoner James A.F, Freeman R. Edward, Gilbert Jr Daniel R. 1996. *Manajemen*. Jilid II. Edisi Bahasa Indonesia. Alih bahasa Alexander Sindoro. Englewood Cliff, New Jersey 07632 : Prentice-Hall, Inc. Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd. Diterbitkan : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Sudandoko H. Djoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.
- Sumarsono, *et.al.* 2010. *Potret 57 DOB – Sebuah Hasil Evaluasi Dini Perkembangan 57 Daerah Otonomi Baru*. Jakarta : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Suardji dan Tejowulan. 2008. *Pengembangan Wilayah Lahan Kering di Provinsi NTB untuk Mendukung Otonomi Daerah*. Makalah bebas.
- Syaukani HR H, Gaffar Afan, Rasyid Ryaas. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSKAP.
- Tadjudin Djuhendi. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor : Penerbit Pustaka Latin.

- 
- Tambunan Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tarigan Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisi revisi. Cetakan kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tarigan Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Cetakan keempat. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Thoha Miftah. 1993. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi*. Cetakan kedua. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Thoha Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid II. Cetakan ketiga. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Thoha Miftah. 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Todaro Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke enam. Munandar Haris, penerjemah. Sumiharti Yati, editor. Jakarta : Penerbit Erlangga. Terjemahan dari : *Economic Development/sixt edition*.
- Tryatmo Mardhianto Wahyu. 2005. *Pemekaran Wilayah dan Pertarungan Elie Lokal di Maluku Utara*. Jilid XXXI, No. 1, 2005. LIPI
- Uphoff dan Ilchman. 1972. *The time Dimension Institution Building and Development*, in Joseph W. Eaton, ed., *Institution Building : From Concept to Application*. Beverly Hills, California : Sage Publications.
- Wahyono Teguh. 2009. *25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17 – Memahami Teknik Analisis Statistik secara Sistematis dan Praktis*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Wasistiono Sadu. 2010. *Bahan Seminar Penyusunan Grand Design Penataan Daerah*. Makalah.
- Wiranto Tatag. 2008. *Perencanaan dalam Era Desentralisasi*. Makalah Bebas.
- [YAPPIKA].ed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Sulsel-Jakarta : FIK-ORNOP dengan JICA CEP.
- Yulistiani Anny, *et.al.* 2007. *Analisis Terhadap Evaluasi Daerah Otonomi Baru Tahun Anggaran 2007*. Laporan Akhir, Desember 2007 : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri – Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.